

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN
ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET KOTA BANDUNG PERIODE 2010-2018**

Syifa Vidya Sofwan, S.E., M.Ak., AK., CA.

Susi Octaviyanti, S.Ak.

Fakultas Ekonomi Universitas Bale Bandung

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaruh (1) Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal, (2) Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, (3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung selama Periode 2010-2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung dengan menggunakan data berupa laporan realisasi anggaran periode 2010-2018.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial (1) Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dimana hasil tersebut dibuktikan dengan hasil t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,736 > 2,4469$) dengan signifikansi 0,034 lebih kecil dari pada 0,050 ($0,034 < 0,050$) dan secara parsial bawah (2) tidak terdapat pengaruh antara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal ini dibuktikan dengan hasil uji t dimana t_{hitung} lebih kecil daripada t_{tabel} ($1,545 < 2,4469$) dan signifikansi ($0,173 > 0,050$). Dan hasil secara simultan menunjukkan (3) hasil F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($6,262 > 4,74$) berdasarkan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa secara simultan terhadap pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Periode 2010-2018.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Belanja Modal.

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang Masalah

Reformasi pemerintahan yang disertai dengan keterbukaan sudah menjadi tuntutan di Indonesia. Hal ini menyebabkan semakin menguatnya tuntutan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi penting dalam pengelolaan pemerintahan termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Hal itulah yang mendorong terjadinya proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi yang disebut dengan otonomi. Otonomi adalah pendelegasian urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan.

Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah lebih berhak dalam membuat kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Peningkatan hak dalam pengelolaan roda pemerintahan daerah tentunya harus diimbangi dengan peningkatan tanggung jawab pemerintahan daerah dalam pelaksanaan roda pemerintahannya. Peningkatan tanggung jawab disini diantaranya adalah supaya pemerintah daerah meningkatkan kemandirian pemerintahan daerah dalam membiayai program-program yang dijalankannya (Abdul Halim & Syukriy Abdullah : 2006).

Kemandirian daerah diharapkan bisa terwujud dengan otonomi daerah karena tentunya pemerintah pusat menyadari bahwa yang paling mengetahui kondisi daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri, otonomi daerah berimplikasi pada kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya. Setiap daerah berpacu untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui penggalian dan pengembangan potensi daerah secara maksimal atas inisiatif dan kekuatan daerah sendiri.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatannya akan berimplikasi pada peningkatan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan belanja daerah. Selain pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dapat disumbangkan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Belanja daerah merupakan anggaran yang berisikan pengeluaran pemerintah selama satu periode untuk melaksanakan program kerja pemerintah. Alokasi belanja daerah harus lebih di peruntukkan untuk kepentingan publik agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakatnya. Apabila kepercayaan publik meningkat, maka kontribusi dari pendapatan asli daerah akan meningkat pula. Sehingga untuk meningkatkan pelayanan publik alokasi belanja daerah harus mengalami perubahan, bila sebelumnya lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai, maka untuk meningkatkan pelayanan publik haruslah lebih diprioritaskan untuk alokasi belanja modal.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan persyaratan utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintahan daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintahan daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan saran dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun fasilitas publik. Belanja modal mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dalam arah pembangunan daerah.

Komposisi belanja modal ini harus diperhatikan sebaik mungkin dalam menunjang kebutuhan fasilitas publik agar dapat meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja pemerintah daerah. Untuk meningkatkan pelayanan publik ini alokasi belanja pun harus mengalami perubahan, bila sebelumnya banyak digunakan dalam pos belanja aparatur, maka jika ingin meningkatkan pelayanan publik haruslah lebih memprioritaskan alokasi belanja. Perubahan alokasi belanja ini juga bertujuan agar adanya peningkatan fasilitas yang dapat menggairahkan peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat yang tentunya akan semakin menumbuhkan investasi di Daerah. Untuk meningkatkan fasilitas publik ini, maka pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar dalam bentuk belanja modal pada APBD.

Untuk peningkatan dalam Belanja Modal Pemerintah Daerah (pemda) juga menggali potensi daerah dalam wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Undang-Undang Dasar Nomor 32 tahun 2004). Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Dasar Nomor 33 tahun 2004).

Selain dari PAD, dalam rangka membiayai kegiatannya Pemda juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Di mana SILPA merupakan angka yang menjadi salah satu bahan untuk perubahan anggaran dalam tahun berjalan, terutama dalam bentuk penyesuaian untuk belanja.

Menurut Tanjung (Dalam Resiana Sukmawati, dkk : 2016) bahwa kelebihan SILPA yang cukup besar dapat mengindikasikan bahwa pemerintah tidak tepat dalam menganggarkan anggaran belanja daerah sehingga seharusnya kelebihan penganggaran tersebut dapat digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan belanja langsung yang berguna untuk penyediaan pelayanan publik pada tahun berjalan menjadi tertunda.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Periode 2010 – 2018”**.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Periode 2010 – 2018?
2. Bagaimana perkembangan sisa lebih pembiayaan anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Periode 2010 – 2018?
3. Bagaimana perkembangan belanja modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Periode 2010 – 2018?

c. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi, dan maksud dari penelitian ini juga adalah untuk mencari kebenaran atas pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal dengan menggunakan data yang diperoleh dan diuji empiris, guna memecahkan permasalahan yang terjadi.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui serta menganalisis:

1. Perkembangan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Periode 2010 – 2018.
2. Perkembangan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Periode 2010 – 2018.
3. Perkembangan pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Periode 2010 – 2018.

d. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang proses pelaksanaan mulai dari pencarian masalah sampai dengan selesai dan hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis dalam mengembangkan dan pemahaman ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi.
2. Manfaat bagi Instansi, dengan penelitian ini instansi dapat menerima secara langsung tentang temuan-temuan yang ditemukan oleh peneliti serta menganalisis dan mengevaluasi kinerja pegawainya. Selain itu, penelitian ini juga berguna sebagai informasi ketika instansi memerlukan materi tentang Laporan Realisasi Anggaran untuk melihat seberapa besar pengaruh dari pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal.
3. Manfaat bagi perguruan tinggi, dengan adanya penelitian ini diharapkan semoga dapat menjadi sumber bacaan bagi Mahasiswa/i khususnya mahasiswa/i S-1 Akuntansi untuk mengetahui pengaruh dari pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal.

II. Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

a. Pengertian Akuntansi

Menurut Thomas Sumarsan (2013) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Indonesia, mendefinisikan akuntansi sebagai berikut:

“Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan”.

Menurut Sofyan Syafri Harapah (2013) dalam bukunya yang berjudul Analisis Kritis atas Laporan keuangan, mendefinisikan akuntansi sebagai berikut:

“Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya”.

Menurut Hans Kartikahadi (2013) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis SAK, mendefinisikan akuntansi sebagai berikut:

“Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan”.

b. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut R Warner Murhadi (2013) dalam buku Pengantar Akuntansi, mendefinisikan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan bahasa bisnis, didalam laporan keuangan berisi mengenai kondisi keuangan perusahaan kepada pihak pengguna. Dengan memahami laporan keuangan suatu perusahaan, maka berbagai pihak yang berkepentingan dapat melihat dapat melihat kondisi kesehatan keuangan suatu perusahaan”.

Menurut Hery (2013) dalam bukunya Auditing (Pemeriksaan Akuntansi I), mendefinisikan bahwa laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan/aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Menurut Irham Fahmi (2014) dalam bukunya Analisis Laporan Keuangan, mendefinisikan bahwa laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan Keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan”.

c. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut Dwi Ratmono dan Mahfud Solihin (2015) dalam bukunya Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua, mendefinisikan bahwa akuntansi sektor publik adalah sebagai berikut:

“Akuntansi sektor publik adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintahan daerah dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal”.

Menurut Erlina, dkk (2015) dalam bukunya Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua, menyatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah sebagai berikut:

“Akuntansi sektor publik adalah Akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi non-profit atau nirlaba. Secara sederhana, akuntansi sektor publik ini dipakai oleh organisasi sektor publik”.

Menurut Sujarweni (2015) dalam bukunya Akuntansi Manajemen, menyatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah sebagai berikut:

“Akuntansi sektor publik adalah salah satu ilmu akuntansi yang digunakan untuk perusahaan nirlaba. Dalam akuntansi sektor publik terdiri dari akuntansi pemerintahan, akuntansi rumah sakit, akuntansi pendidikan, akuntansi yayasan dan akuntansi organisasi nirlaba lain yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan semata-mata”.

d. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Abdul Halim (2011) dalam bukunya yang berjudul Analisis Investasi, mendefinisikan bahwa pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

“Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu, pajak daerah, retribusi daerah, hasil

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Periode 2010 – 2018 | Syifa Vidya Sofwan, Susi Octaviyanti

perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003, mendefinisikan bahwa pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

“Pendapatan asli daerah adalah penambahan nilai kekayaan bersih yang berhak diakui pemerintahan daerah”.

Menurut Mardiasmo (2011) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan, menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

“Pendapatan Asli Daerah (PAD), adalah penerimaan hasil dari setoran pajak daerah, retribusi daerah hasil dari milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sebagaimana disebutkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan setiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi baik di daerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatannya”.

e. Pengertian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Menurut Sofyan Siregar (2015) dalam bukunya Statistik Terapan untuk Perguruan Tinggi, mendefinisikan bawah sisa lebih pembiayaan anggaran adalah sebagai berikut:

“SILPA atau sisa lebih pembiayaan anggaran merupakan sisa lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, mendefinisikan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran adalah sebagai berikut:

“Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode”.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, mendefinisikan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran adalah sebagai berikut:

“Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode anggaran. SILPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban pada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan”.

f. Pengertian Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, mendefinisikan bahwa Belanja Modal adalah sebagai berikut:

“Belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya”.

Menurut Perdirjen Perbendaharaan Tahun 2008, mendefinisikan bahwa Belanja Modal adalah sebagai berikut:

“Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset”.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2007, mendefinisikan bahwa Belanja Modal adalah sebagai berikut:

“Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut

dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual”.

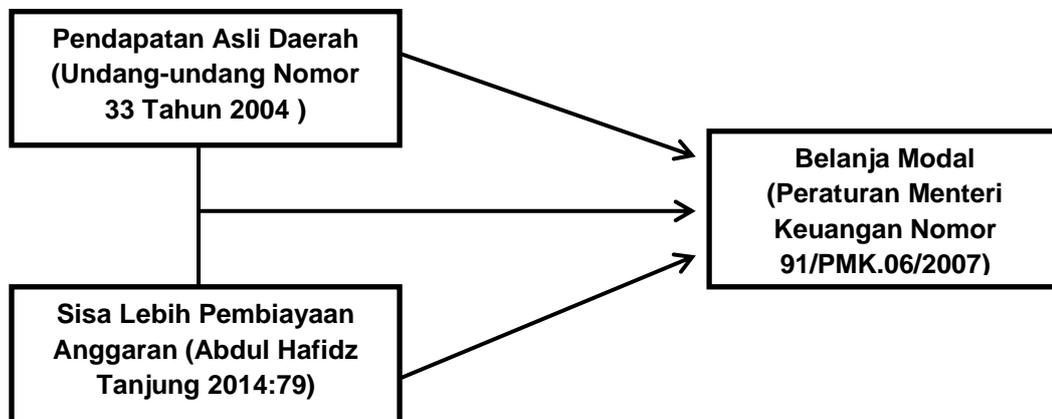
g. Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono) 2017 dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, mendefinisikan bahwa kerangka berpikir adalah sebagai berikut:

“Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting”.

Menurut Suriasumantri (dalam Sugiyono) 2017 dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, mendefinisikan bahwa kerangka berpikir adalah sebagai berikut:

“Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan”.



GAMBAR 1
Paradigma Penelitian

h. Hipotesis Penelitian

1. Terdapat Pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.
2. Terdapat Pengaruh antara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal.
3. Terdapat Pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal.

III. Obejek dan Metode Penelitian

a. Obejek Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian yang harus diperhatikan yaitu objek penelitian yang akan diteliti. Dimana terdapat masalah – masalah yang akan dijadikan bahan penelitian untuk dicari pemecahannya. Adapun pengertian objek penelitian menurut Sugiyono (2012) dalam buku metode penelitian sebagai bisnis, mengemukakan objek penelitian sebagai berikut

“Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu)”.

Objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Periode 2010-2018.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Periode 2010 – 2018 | Syifa Vidya Sofwan, Susi Octaviyanti

b. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiyono (2017) dalam bukunya Metode Penelitian Bisnis, menyatakan bahwa:

“Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.

Sedangkan menurut Suntoyo (2013) dalam bukunya Metode Penelitian Akuntansi mengemukakan metode penelitian sebagai berikut :

“Metode penelitian merupakan urutan-urutan proses analisis data yang akan disajikan secara sistematis, karena dengan urutan proses analisis data dapat diketahui secara cepat dan membantu pemahaman maksud dari penelitian tersebut.

Metode penelitian ini meliputi model dan operasionalisasi variabel, dimana model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian deskriptif dan verifikatif yaitu untuk mengetahui perkembangan dan pengaruh X_1 dan X_2 terhadap Y baik secara masing-masing maupun secara bersama-sama.

Sedangkan operasionalisasi variabel merupakan definisi mengenai variabel-variabel penelitian yang diambil dari teori kepustakaan dan merupakan teori penghubung dari judul yang diteliti, sebagai berikut :

**Tabel 1
Operasionalisasi Variabel**

| Variabel | Konsep Variabel | Indikator Variabel | Skala |
|---|--|--|--------------|
| Variabel bebas (X_1): Pendapatan Asli Daerah | Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu, pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (Abdul Halim: 2011) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak daerah 2. Retribusi daerah 3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan 4. Lain-lain pendapatan yang sah | Rasio |
| Variabel bebas (X_2): Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | Sisa lebih pembiayaan anggaran adalah selisih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah selama satu periode pelaporan. (Abdul Hafidz Tanjung 2014) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui selisih antara realisasi pendapatan dan belanja; 2. Mengetahui penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. | Rasio |
| Variabel terikat (Y): Belanja Modal | Menurut peraturan Pemerintahan, Belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja tanah 2. Belanja peralatan dan mesin 3. Belanja bangunan dan bangunan 4. Belanja jalan, irigasi dan jaringan 5. Belanja aset tetap lainnya | Rasio |

| Variabel | Konsep Variabel | Indikator Variabel | Skala |
|----------|---|--------------------|-------|
| | pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, insfrastuktur, dan harta tetap lainnya. | | |

c. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen, untuk mengetahui keadaan naik turunnya variabel yang diteliti. Menurut Sugiyono (2017:275) dalam bukunya "Statistika Untuk Penelitian", mengemukakan bahwa:

"Analisis regresi ganda digunakan bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik/turunnya) variabel independen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor *predictor* dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2".

Bila dijabarkan secara matematis, bentuk persamaan dari regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Gambar 2
Rumus Analisis Regresi Linear Berganda
Sumber: Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian

Keterangan :

Y = Variabel terikat (Belanja Modal)

X₁ = Variabel bebas (Pendapatan Asli Daerah)

X₂ = Variabel bebas (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)

a = Bilangan konstanta, yaitu besarnya nilai Y ketika nilai X₁, X₂ = 0

b₁, b₂ = Koefisien regresi

2. Analisis Koefisien Korelasi

Korelasi pada dasarnya merupakan nilai yang menunjukkan tentang adanya hubungan antara dua variabel atau lebih serta besarnya hubungan tersebut. Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan sebab akibat yang terjadi antara X₁ dan X₂ terhadap Y. Analisis koefisien korelasi meliputi koefisien korelasi parsial dan koefisien korelasi ganda.

3. Koefisien Determinasi

Setelah koefisien korelasi ganda (R) diketahui serta untuk membuktikan hasil pengaruh secara simultan. Menurut Ghozali (2016:98), tujuan koefisien determinasi (R²) pada intinya adalah :

"Koefisien determinasi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa secara matematis koefisien determinasi dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$KD = R^2 \cdot 100\%$$

Gambar 3
Rumus Koefisien Determinasi
Sumber: Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian

Keterangan :

KD = Koefisien Determinasi

R^2 = Koefisien Korelasi ganda

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

1. Jika KD mendekati nol (0), maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lemah.
2. Jika KD mendekati satu (1), maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat.

d. Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Bisnis, Kuantitatif Kualitatif dan R&D mendefinisikan:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) adalah pernyataan tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik (data sampel) sedangkan hipotesis alternatif (H_a) adalah pernyataan ada perbedaan antara parameter dan statistik. Maka H_0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan H_a menunjukkan adanya dampak antara variabel independen dan variabel dependen. Hipotesis yang dirumuskan dapat diuji melalui pengujian hipotesis berikut ini:

1. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji t statistik digunakan untuk melihat signifikansi Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} .

Untuk mencari nilai t_{hitung} maka pengujian tingkat signifikannya adalah dengan menggunakan rumus yang dikemukakan menurut Sugiyono (2017:230) dalam bukunya yang berjudul Statistika Untuk Penelitian, adalah sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{rp \sqrt{n-3}}{\sqrt{1-rp^2}}$$

Gambar 4
Rumus Uji Signifikansi Parsial
Sumber: Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian

Keterangan :

rp = Korelasi Parsial

n = Banyaknya sampel

Setelah menghitung nilai t_{hitung} , selanjutnya bandingkan dengan nilai t_{tabel} dengan menggunakan kriteria pengujian berikut:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh).
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak berpengaruh).
3. Apabila menggunakan program komputer (*software SPSS*), jika nilai sig $< \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak.

Kemudian membuat kesimpulan mengenai diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat apakah Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap Belanja Modal. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} .

Menurut Sugiyono (2017:235), F_{hitung} dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Gambar 5
Rumus Uji Signifikansi Simultan
Sumber: Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian

Keterangan:

R^2 = Koefisien korelasi ganda

K = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota sampel

dk = (n-k-1) derajat kebebasan.

Setelah itu, gunakan kriteria pengujian dengan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} yaitu:

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh).
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak berpengaruh)
3. Apabila menggunakan program komputer (*software SPSS*), jika nilai $sig < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 2
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 15.160 | 17.781 | | 1.933 | .101 |
| | PAD | .247 | .090 | .654 | 2.736 | .034 |
| | SILPA | .315 | .204 | .369 | 1.545 | .173 |

a. Dependent Variable: BELANJA

Dari data diatas dapat dibuat persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 15,160 + 0,247 X_1 + 0,315 X_2$$

Keterangan:

Y = Belanja Modal

X_1 = Pendapatan Asli Daerah

X_2 = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 15,160. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel independen ditiadakan atau penerimaan Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X_2) nilainya 0, maka Belanja Modal (Y) adalah 15,160.
2. Koefisien regresi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (X_1) sebesar 0,247. Hal ini menunjukkan indikasi adanya hubungan yang searah yang artinya jika nilai variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) naik 1% (0,01) maka akan menyebabkan kenaikan Belanja Modal sebesar 0,247 dengan asumsi variabel tetap.
3. Koefisien regresi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X_2) sebesar 0,315. Hal ini menunjukkan indikasi adanya hubungan yang searah yang artinya jika nilai variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X_2) naik 1% (0,01) maka akan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Periode 2010 – 2018 | Syifa Vidya Sofwan, Susi Octaviyanti

menyebabkan kenaikan Belanja Modal sebesar 0,315 dengan asumsi variabel tetap.

2. Analisis Koefisien Korelasi

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Korelasi Parsial X_1 terhadap Y
Correlations

| Control Variables | | | PAD | BELANJA |
|-------------------|---------------|-------------------------|-------|---------|
| SILPA | PAD | Correlation | 1.000 | .745 |
| | | Significance (2-tailed) | . | .034 |
| | | Df | 0 | 6 |
| BELANJA MODAL | BELANJA MODAL | Correlation | .745 | 1.000 |
| | | Significance (2-tailed) | .034 | . |
| | | Df | 6 | 0 |

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Korelasi Parsial X_2 terhadap Y
Correlations

| Control Variables | | | SILPA | BELANJA |
|-------------------|---------------|-------------------------|-------|---------|
| PAD | SILPA | Correlation | 1.000 | .534 |
| | | Significance (2-tailed) | . | .173 |
| | | Df | 0 | 6 |
| BELANJA MODAL | BELANJA MODAL | Correlation | .534 | 1.000 |
| | | Significance (2-tailed) | .173 | . |
| | | Df | 6 | 0 |

Tabel 5
Hasil Uji Korelasi Korelasi Ganda (R)

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .822 ^a | .676 | .568 | 18.85458 | 2.468 |

a. Predictors: (Constant), SILPA, PAD

b. Dependent Variable: BELANJA

Dilihat dari hasil perhitungan koefisien korelasi diatas, menunjukkan bahwa :

- a. Korelasi antara Biaya Operasional(X_2) dengan Laba Bersih(Y) adalah sebesar 0,745 yang berarti terdapat korelasi positif yang menunjukkan hubungan kedua variabel tersebut secara searah, Interval koefisien dari perhitungan diatas menunjukkan angka 0,745. Jika melihat interval koefisien angka 0,745 berada diantara 0,60-0,799 yang berarti variabel X_1 mempunyai hubungan yang kuat dengan variabel Y.

- b. Korelasi antara Biaya Operasional(X_2) dengan Laba Bersih(Y) adalah sebesar 0,534 yang berarti terdapat korelasi positif yang menunjukkan hubungan kedua variabel tersebut secara searah, Interval koefisien dari perhitungan diatas menunjukkan angka 0,534. Jika melihat interval koefisien angka 0,534 berada diantara 0,40-0,599 yang berarti variabel X_2 mempunyai hubungan yang sedang dengan variabel Y.
- c. Korelasi ganda antara Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara simultan dengan Belanja Modal adalah sebesar 0,822. Nilai korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal secara simultan adalah searah, artinya jika Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan ANggarannaik, maka Belanja Modalpun akan meningkat. Jika melihat pada interval koefisien, angka 0,822 berada di antara 0,80 - 1,000 yang berarti variabel X_1 dan X_2 memiliki hubungan yang sangat kuat dengan variabel Y.

3. Koefisien Determinasi

Tabel 6
Hasil Uji Korelasi Ganda (R Square)

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .822 ^a | .676 | .568 | 18.85458 | 2.468 |

a. Predictors: (Constant), SILPA, PAD

b. Dependent Variable: BELANJA

Dari tabel diatas, diketahui nilai R Square sebesar 0,676. Nilai R Square menunjukkan nilai koefisien determinasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai KD = 0,676 (67,6%). Artinya, Belanja Modal dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Sebesar 67,6%.

4. Pengujian Hipotesis

a. Pengaruh Secara Parsial Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Tabel 7
Hasil Uji t (Parsial) X_1 terhadap Y
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | 15.160 | 17.781 | | 1.933 | .101 |
| PAD | .247 | .090 | .654 | 2.736 | .034 |
| SILPA | .315 | .204 | .369 | 1.545 | .173 |

a. Dependent Variable: BELANJA

Pada tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel independen Pendapatan Asli Daerah (X_1) adalah sebesar 2,736 dengan signifikansi 0,034 sedangkan t_{tabel} dengan dk 9 ($n-3 = 9-3$) adalah 2,446 dan taraf signifikansi 0,05. Mengacu pada kriteria pengambilan keputusan dan hasil perhitungan diatas terlihat jika t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} ($2,736 > 2,446$) dan taraf signifikansi (0,034) lebih kecil daripada 0,05 maka H_0

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Periode 2010 – 2018 | Syifa Vidya Sofwan, Susi Octaviyanti

ditolak H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Periode 2010-2018.

Selama ini Pendapatan Asli Daerah memiliki peran untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai tujuan penyelenggaraan otonomi daerah dan ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah tersebut. Bermula dari keinginan untuk mewujudkan harapan tersebut, Pemerintah Daerah melakukan berbagai cara dalam meningkatkan pelayanan publik, yang salah satunya dilakukan dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui Belanja Modal. Akan tetapi Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 2018 mengalami penurunan sedangkan pada Belanja Modal mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan dari tahun sebelumnya, kenaikan pada Belanja Modal ini didukung oleh faktor lainnya diantaranya adalah dana dari pusat karena Belanja Modal setiap tahunnya, hal ini menjadi penting karena dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat seperti fasilitas bangunan dan pembangunan daerah yang tentunya dengan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat akan semakin membangun kepercayaan publik kepada pemerintah juga untuk mendorong peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah.

b. Pengaruh Secara Parsial Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal

Tabel 8
Hasil Uji t (Parsial) X_2 terhadap Y
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 15.160 | 17.781 | | 1.933 | .101 |
| PAD | .247 | .090 | .654 | 2.736 | .034 |
| SILPA | .315 | .204 | .369 | 1.545 | .173 |

a. Dependent Variable: BELANJA

Pada tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel independen Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X_2) adalah sebesar 1,545 dengan signifikansi 0,173 sedangkan t_{tabel} dengan dk 9 ($n-3 = 9-3$) adalah 2,446 dan taraf signifikansi 0,05. Mengacu pada kriteria pengambilan keputusan dan hasil perhitungan diatas terlihat jika t_{hitung} lebih kecil dari pada t_{tabel} ($1,545 < 2,776$) dan taraf signifikansi (0,173) lebih besar daripada 0,05 maka H_0 diterima H_a ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Periode 2010-2018.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dikarenakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak selalu ada dalam laporan APBD Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran hanya terjadi jika ada surplus. Surplus yang terjadi pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan realisasi belanja dan untuk membiayai kewajiban lainnya yang hingga akhir tahun anggaran belum sempat terselesaikan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak digunakan untuk alokasi Belanja Modal tahun berikutnya, karena Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan di Daerah tersebut lebih kecil dibandingkan realisasinya serta untuk mendanai kewajiban lainnya yang sampai pada akhir tahun anggaran belum dapat terrealisasi. Apabila defisit

anggaran belum tertutupi maka harus mengurangi pembiayaan yang lain seperti utang dan lain sebagainya atau dengan mengurangi alokasi pada Belanja. Terbentuknya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran hanya jika adanya kelebihan atau surplus pada APBD dimana penerimaan lebih besar dibandingkan pengeluaran, ada atau tidaknya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dapat dilihat dari seberapa besar tingkat belanja yang dilakukan pada Daerah tersebut. Jika daerah tersebut pada tahun anggaran tingkat belanja relatif rendah maka untuk memperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran akan cukup besar begitupun sebaliknya.

c. Pengaruh Secara Simultan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal

Tabel 9
Hasil Uji F (Simultan) X_1 dan X_2 terhadap Y
ANOVA^b

| Model | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| 1 | Regression | 4452.399 | 2 | 2226.200 | 6.262 | .034 ^a |
| | Residual | 2132.972 | 6 | 355.495 | | |
| | Total | 6585.371 | 8 | | | |

a. Predictors: (Constant), SILPA, PAD

b. Dependent Variable: BELANJA

Dari tabel 8 diatas, dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} adalah 6,262, sedangkan F_{tabel} dapat diperoleh dengan tabel F derajat bebas yaitu residual 6 dan regresi 2 dengan taraf signifikan 0,034, sehingga diperoleh F_{tabel} sebesar 4,74. Karena F_{hitung} lebih besar dari pada F_{tabel} ($6,262 > 4,74$) dan taraf signifikansi yaitu ($0,034 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Periode 2010-2018.

Pengaruh yang signifikan Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara bersama-sama terhadap Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung. Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran memiliki pengaruh yang kuat terhadap Belanja Modal, walupun secara sendiri-sendiri menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh dengan korelasi yang kuat, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh signifikan dengan korelasi yang kuat. Artinya kedua variabel Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ini jika bersama-sama akan memberikan kontribusi yang positif, memiliki korelasi yang sangat kuat dan signifikan terhadap Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung dengan sumbangan pengaruh sebesar 67,6%.

V. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diajukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung, penulis mengambil judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Periode 2010-2018, maka dari hasil penelitian ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung setiap tahunnya dalam periode 2010-2018 mengalami perubahan yang fluktuatif baik dari segi realisasi maupun segi perubahan yang disebabkan oleh pos-pos penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang mengalami perubahan setiap tahunnya dikarenakan sumber Pendapatan Asli Daerah itu sendiri yaitu Hasil

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Periode 2010 – 2018 | Syifa Vidya Sofwan, Susi Octaviyanti

- Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung dalam periode 2010-2018 setiap tahunnya mengalami perubahan yang fluktuatif, perubahan yang cenderung besar dapat membawa dampak negatif dan positif untuk daerah itu sendiri dampak positifnya adanya timbal balik dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran untuk Pemerintahan Daerah dikarenakan Sisa Lebih Pembiayaan itu adalah Suplus yang terjadi pada tahun sebelumnya untuk digunakan ditahun berikutnya, sedangkan dampak negatifnya adalah ada beberapa Perencanaan baik itu pembangunan fasilitas atau lainnya yang tidak terlaksana sehingga dapat merugikan masyarakat.
 3. Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung setiap tahunnya dalam periode 2010-2018 mengalami perubahan yang fluktuatif baik dari realisasi maupun anggarannya hal ini disebabkan oleh naik turunnya sumber Belanja Modal itu sendiri seperti Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Penjaringan, dan Belanja Modal Fisik lainnya.

b. Saran

Berdasarkan hasil dari peneliti dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Periode 2010-2018, penulis dapat memberikan saran yang dapat bermanfaat dari hasil penelitian yang dilakukan ini. Adapun saran hasil dari penelitian ini yaitu:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung sebaiknya meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya yang sempat mengalami penurunan, dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kota Bandung dapat memanfaatkan dan menggali sumber-sumber ekonomi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah nya seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Milik Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah pula dapat menunjukkan seberapa besar kemandirian suatu Daerah dalam meningkatkan keuangan sehingga lebih baik.
2. Untuk sebaiknya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dapat lebih diminimalisir kembali dengan cara memonitor Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD), agar dapat mengetahui penyebab dari timbulnya surplus pada tahun sebelumnya atau yang disebut dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.
3. Proposi pada anggaran untuk Belanja Modal dalam APBD perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan agar jumlahnya signifikan dengan pos-pos Belanja Daerah lainnya, sehingga Pemerintah Daerah dapat meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan publik secara maksimal sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan lagi.

Daftar Pustaka

Buku:

Erlina, Sakti Rambe, Rasdianto, 2015, Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua. Jakarta: Salemba Empat, Ikatan Akuntansi Indonesia

Fahmi, Irham . 2014. Analisis Laporan Keuangan. Bandung: Alfabeta.

Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS. Edisi 7. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul. 2011. Analisis Investasi. Edisi kedua. Jakarta: Salemba Empat.

Harahap, Sofyan Syafri. 2013. Analisa Kritis atas Laporan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hans, Kartikahadi. dkk. 2016. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis SAK Berbasis IFRS Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.

Hery. 2013. Auditing (Pemeriksaan Akuntansi I), Cetakan Pertama. Jakarta: CAPS.

Mardiasmo. 2011. "Perpajakan Edisi Revisi". Yogyakarta: Penerbit Andi.

Ratmono, Dwi & Sholihin, Mahfud. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua. Cetakan pertama. Upp Stim Ykpn : Yoyakarta.

Siregar, Syofian. 2015. Statistika Terapan untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2017. Statistik Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Manajemen. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sumarsan, Thomas. 2013. Perpajakan Indonesia: Edisi 3. Jakarta: PT. Indeks.

Warren D. Carl. 2013. Pengantar Akuntansi, Buku I. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Dasar:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar.

Perdirjen Perbendaharaan No. PER-33/PB/2008 Tentang Pedoman Penggunaan AKUN Pendapatan, Belanja pegawai, Belanja barang dan Belanja modal sesuai dengan BAS.

Jurnal:

Sukmawati, Resiana. Suwendar, I Wayan. Yudiaatmaja, Fridayana. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Daerah Kabupaten. Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja, Indonesia. Vol. 4. (<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JMI/article/viewFile/6680/4541>).